

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk yang banyak serta padat. Dengan demikian, Indonesia berpeluang memiliki banyak permasalahan sosial seperti masalah kemiskinan. Menurut versi Badan Pembangunan Dan Perencanaan Daerah (Bappeda) Provinsi Yogyakarta mengatakan angka garis kemiskinan di Yogyakarta adalah Rp 432.026 kapita/bulan per tahun 2019. Jadi, individu atau orang-orang yang memiliki pendapatan di bawah Rp 432.026 perbulan dikategorikan sebagai orang miskin. Sementara menurut Bappenas yang disebut orang miskin salah satunya yaitu kurangnya kemampuan membaca dan menulis serta akses ke ilmu pengehuan yang terbatas.

Tabel 1. 1

Data Kemiskinan di DIY Tahun 2019

Wilayah	2018	2019
Yogyakarta	29,75	29,45
Sleman	92,04	90,17
Bantul	134,84	131,15
Kulon Progo	77,72	74,62
Gunungkidul	125,76	123,08
Total	460,11	448,47

Satuan (Ribu Jiwa)

Sumber: Bappeda Jogjaprov

Seperti pada tabel diatas, melansir dari Bappeda DIY (2020) diakses pada 30 September 2020. Data pengentasan kemiskinan Provinsi Yogyakarta 2019, menjelaskan jumlah warga Yogyakarta adalah 3.298.323 jiwa, dan yang masuk dalam kategori pendudukan miskin sebanyak 448.470 jiwa atau sekitar 11,70 persen dari penduduk DIY. Angka ini mengalami penurunan dibanding dengan jumlah warga miskin pada tahun 2018 lalu yaitu sebanyak 460.110 orang.

Dengan adanya tingkat kemiskinan di Yogyakarta tersebut akan berpengaruh dalam persoalan pendidikan, seperti banyaknya anak yang tidak dapat bersekolah dan tentunya akses pendidikan tidak terwujud sepenuhnya. Karena kemiskinan menjadi hal utama dalam menciptakan persoalan dalam kehidupan sosial, seperti pendidikan dan akhirnya menciptakan rendahnya proses dalam menggapai masa depan.

Tabel 1. 2
Angka Partisipasi Murni menurut Jenjang
Tahun 2019

Jenjang Pendidikan	Angka Partisipasi
SD/MI	99,55
SMP/MTs	81,14
SMA/SMK/MA	71,76
PT (19-23 th)	58,33

Sumber : BPS, Statistik Pendidikan Indonesia 2019 (2019:149)

Diketahui dari tabel di atas bahwa Angka partisipasi murni (APM) di Wilayah Yogyakarta senantiasa mengalami penurunan. APM adalah perbandingan antara siswa usia sekolah tertentu pada jenjang pendidikan

dengan penduduk usia yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Pada jenjang Sekolah Dasar saja yang memiliki angka partisipasi yang belum seutuhnya penuh, yang artinya semua anak usia Sekolah Dasar belum dapat menikmati pendidikan sesuai dengan pendidikan pada jenjang usianya. Sedangkan pada jenjang lainnya mengalami kecenderungan menurun. Hal tersebut dibersamani dengan fakta bahwa angka sekolah pada jenjang SMA tercatat menurun pada tahun 2019 yang disebabkan oleh cukup mahal biaya pendidikan di tingkat SMA. Bahkan pada jenjang PT (Perguruan Tinggi) angka APM mengalami penurunan yang cukup pesat. (BPS, 2019:149).

Dari beberapa fakta tersebut menunjukkan adanya kesenjangan pendidikan yang belum sepenuhnya dapat menjangkau penduduk di semua lapisan masyarakat. Khususnya masyarakat dalam keadaan ekonomi rendah. Hal ini tentunya menjadi koreksi bagi pemerintah agar mampu meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat khususnya masyarakat yang berada dalam keadaan ekonomi rendah.

Menurut survey yang dilakukan oleh OECD (*Organisation for Economic Co-operation and Development*) atau organisasi internasional yang bergerak di bidang kerjasama ekonomi dan pembangunan . Hasil survey yang OECD lakukan pada tahun 2018, yang diikuti sebanyak 79 negara, meningkat sebanyak 7 negara dari tes PISA (*Programme for International Student Assessment*) pada tahun 2015. Tes PISA adalah studi internasional tentang prestasi literasi membaca, matematika, dan sains siswa

sekolah yang berusia 15 tahun. Skor membaca Indonesia menduduki peringkat 72 dari 77 negara, diikuti skor matematika peringkat 72 dari 78 negara, dan skor sains peringkat 70 dari 78 negara. Ketiga skor tes PISA tersebut menurun dibandingkan tes pada 2015, dimana Indonesia berada di peringkat 65 untuk skor membaca, 64 untuk skor sains, dan 66 untuk skor matematika (Kurnia, 2019).

Terdapat cukup banyak anak-anak dari keluarga miskin yang akhirnya terpaksa harus tidak merasakan bangku sekolah karena kekurangan biaya. Keluarga mereka tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan biaya sekolah atau pendidikan karena dalam memenuhi kebutuhan hidup saja terkadang masih kesulitan. Dari data di atas menjelaskan bahwa masalah pendidikan merupakan permasalahan nasional yang harus diselesaikan secepatnya karena akan memberikan dampak negatif terhadap permasalahan sosial dan lainnya. Pendidikan merupakan kunci untuk menyiapkan Sumber Daya Masyarakat (SDM) yang berkualitas, kompetitif serta memiliki keunggulan komparatif, sehingga mampu merebut pangsa pasar tenaga kerja dunia dan pada akhirnya kesejahteraan yang menjadi cita-cita bangsa akan tercapai. Oleh karena itu pendidikan yang berkualitas hendaknya menjadi sebuah keharusan bagi setiap anak bangsa termasuk mereka yang kurang mampu.

Menurut Islam sendiri kemiskinan digambarkan pada dua golongan yaitu, fakir dan miskin. Dalam konteks ini kedua golongan tersebut tidak dapat memenuhi seluruh kebutuhan dasarnya. Namun yang membedakan

dari keduanya adalah fakir masih memiliki potensi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya namun tidak mencukupi sedangkan orang miskin tidak memiliki potensi memenuhi kebutuhan tersebut.

Tamim (2011:36) mengatakan bahwa Islam memandang permasalahan kemiskinan telah ada penanggulangannya melalui kegiatan sosial yang melekat pada setiap individu dengan pola redistribusi pendapatan. Islam menawarkan penyelesaian masalah kemiskinan melalui kewajiban individu untuk memberikan hak yang wajib diterima oleh individu lain melalui kegiatan zakat, infaq, sadaqah, wakaf, dan waris. Kegiatan “memberi” dalam beberapa bentuk tidak terbatas uang ataupun barang, tetapi juga berupa pekerjaan atau berbagai macam upaya untuk meringankan beban orang miskin dan meningkatkan kesejahteraannya. Kesiatan tersebut biasa disebut sebagai filantropi.

Filantropi, yang berarti “kedermawanan”, kini dimaknai secara lebih fleksibel dan beragam dalam masyarakat. Praktik Islam dapat dilalui dalam filantropi digali dari doktrin keagamaan yang bersumber dari Al-Qur’an dan Hadist yang dimodifikasi dengan perantara ijtihad. Tujuan institusi zakat, infaq, sedekah dan wakaf muncul, adalah agar dana tidak hanya berputar pada orang-orang yang memiliki saja (orang kaya), namun dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Dalam arti yang lebih luas, perluasan dan percepatan perputaran uang merupakan representasi dari kegiatan ekonomi dan sosial (Latief, 2013:11).

Praktik kedermawanan ditandai oleh perkembangan gerakan filantropi yang lebih terorganisikan. Peran organisasi-organisasi filantropi bermacam-macam, mulai dari menawarkan bentuk-bentuk aktifitas kreatif yang sangat terbatas dampak sosialnya, sampai bentuk-bentuk kegiatan yang menawarkan gagasan transformatif tentang keadilan sosial. Definisi filantropi dalam konteks kegiatan keorganisasian atau kolektif tidak diartikan sebagai kegiatan individual tetapi kegiatan kolektif yang dilaksanakan oleh atau melalui organisasi atau lembaga. Kegiatan ini mencakup penggalangan, pengelolaan, dan pendayagunaan dana sosial dari masyarakat untuk kepentingan bersama (Latief, 2013:8).

Di Negara Indonesia saat ini banyak berdiri lembaga atau organisasi filantropi yang berbasis keagamaan di bawah pemerintah dan bergerak sesuai undang undang yang ada seperti BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) dan BAZDA (Badan Amil Zakat Daerah). Selain itu terdapat juga lembaga yang didirikan oleh organisasi masyarakat/Ormas yaitu LAZIS (Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah). Beberapa tahun belakangan, tumbuh LAZIS di berbagai daerah maupun pusat, LAZIS tersebut memiliki tujuan yang sama dalam mengembangkan filantropi dan memaksimalkan potensi yang ada di Indonesia sebagai salah satu negara muslim terbesar di dunia.

LAZISMU adalah lembaga zakat tingkat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infaq, wakaf dan dana kedermawanan lainnya baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan dan instansi lainnya. Faktor yang

melatar belakangi berdirinya LAZISMU salah satunya yaitu, fakta bahwa Indonesia yang berselimut dengan kemiskinan yang masih meluas, kebodohan dan indeks pembangunan manusia yang sangat rendah. Semuanya berakibat dan sekaligus disebabkan tatanan keadilan sosial yang lemah. Dengan narasi pemanfaatan dan pengelolaan zakat yang baik dapat diharapkan mampu membangun indeks pembangunan Indonesia pada khususnya.

Tujuan Pembangunan Milenium (*Millennium Development Goals/MDGs*) yang telah dilaksanakan selama periode 2000-2015 memang telah membawa berbagai kemajuan. Sekitar 70 persen dari total indikator yang mengukur target MDGs telah berhasil dicapai oleh Indonesia. Berakhirnya MDGs pada 2015 masih menyisakan sejumlah pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pada periode Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) yang akan dilaksanakan sampai dengan 2030.

BPS (2017:3) mengemukakan untuk menjamin dan mengimplementasi SDGs berjalan dengan baik, pemerintah telah membentuk Sekretariat Nasional Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Sekretariat Nasional SDGs bertugas mengkoordinasikan berbagai kegiatan terkait pelaksanaan SDGs di Indonesia. Sejumlah pemangku kepentingan yang mencakup kementerian/lembaga, BPS, akademisi, pakar, organisasi masyarakat sipil dan filantropi & bisnis telah dilibatkan dalam berbagai proses persiapan pelaksanaan SDGs di Indonesia.

Kemudian dalam SDGs dalam poin ke 4 bertujuan untuk menjamin dan memastikan bahwa semua orang memiliki akses terhadap pendidikan yang berkualitas dan memiliki kesempatan belajar yang merata selama hidupnya. Tujuan ini berfokus pada perolehan keterampilan dasar dan tinggi di semua jenjang pendidikan; akses yang lebih besar dan lebih adil terhadap Pendidikan bagi anak dhuafa di semua jenjang, termasuk pendidikan teknis dan kejuruan; dan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang dibutuhkan untuk berfungsi dan berkontribusi dengan baik dalam kehidupan sosial.

Fikih zakat untuk mencapai suatu pembangunan yang berkelanjutan atau fikih zakat *on* SDGs adalah bentuk ikhtiar dalam membangun relasi antara keduanya. Zakat sebagai suatu instrument dalam mendistribusikan ekonomi bertujuan mengentaskan kemiskinan dan memajukan ekonomi. Sementara itu, SDGs adalah satu bentuk kesepakatan masyarakat dunia dalam usaha mewujudkan dunia yang terbebas dari kemiskinan, dengan berkehidupan yang bermatabat, adil, dan sejahtera, serta adanya kerjasama di antara mereka. Sebuah keadaan masyarakat yang ideal dan diidamkan melalui bentuk perwujudan pembangunan berkelanjutan (SGDs) di tahun 2030. Relasi yang dimaksud yaitu bersifat dua arah; zakat sebagai instrument yang mendukung SDGs dan penerapan terhadap paradigma SDGs dalam upaya pengelolaan zakat (Maksum, 2018:XV).

Telah banyak NGO (*Non Governmental Organization*) yang ikut terlibat atau terjun kedalam pencapaian SDGs 2030, baik dari segi sosial,

ekonomi, pendidikan, lingkungan, dan sebagainya. Dari banyaknya NGO Internasional yang terlibat dalam bidang pendidikan SGD, setidaknya ada dua NGO yang dikatakan terlibat atau berfokus pada permasalahan pendidikan dan anak, yaitu *Save The Children* dan YCAB Foundation (Yayasan Cinta Anak Bangsa). Pertama, NGO *Save The Children* yang merupakan lembaga yang didirikan oleh Eglantyne Jebb seorang reformis sosial Inggris pada tahun 1919 yang bertepatan setelah perang dunia 1. *Save The Children* adalah gerakan global pertama untuk anak-anak. Di Indonesia sendiri, *Save The Children* telah beroperasi semenjak 1976. Pada tahun 2014, Yayasan Sayangi Tunas Cilik muncul sebagai identitas lokal dari *Save The Children* di Indonesia dan terdaftar resmi melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. *Save The Children* memiliki sebuah ambisi besar dalam jangka panjang untuk anak-anak Indonesia hingga 2030, yaitu : (1) Memastikan setiap anak dapat bertahan hidup dari sebab yang dapat dicegah sebelum usia 5 tahun (*survive*), (2) Memastikan setiap anak mendapatkan pendidikan yang berkualitas (*Learn*), (3) Memastikan setiap anak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan (*Be Protected*). Kedua, YCAB Foundation (Yayasan Cinta Anak Bangsa) adalah NGO yang berasal dari Indonesia, dan didirikan oleh Veronica Colondam pada tahun 2013. YCAB Foundation menempati peringkat 74 NGO dari 100 NGO terbaik dunia berdasarkan laporan *The Global Journal* yang berfokus pada isu sosial dan pembangunan. YCAB Foundation didirikan pada tahun 1999 dan berfokus pada isu remaja melalui tiga pilar,

yaitu kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi. YCAB mendasarkan operasinya pada model perubahan sosial yang saling menguatkan dan berkelanjutan secara finansial dengan satu misi yang jelas yaitu meningkatkan kesejahteraan melalui pendidikan dan pembiayaan inovatif. YCAB sekarang sedang menjajaki cara untuk menerapkan konsep dalam model perubahannya, yaitu menciptakan sistem berkelanjutan di mana siswa yang lulus dan menjadi wirausaha atau bekerja dapat mandiri kedepannya. Selain dengan memberikan pendidikan bagi kaum muda yang kurang mampu dengan cara rumah belajar dan beasiswa agar mereka dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, mereka melakukan dengan memberikan atau berinvestasi dalam reksa dana untuk menumbuhkan dan meningkatkan keuangan yang digerakkan oleh misi YCAB, sehingga YCAB berharap bahwa lebih banyak lagi kaum muda untuk mengendalikan nasib mereka sendiri dengan kemandirian secara finansial dan ekonomi.

Proses dalam mewujudkan SDGs tentunya harus ada kontribusi dari berbagai pihak, terlepas dari NGO Internasional diatas, ada juga lembaga filantopi Islam yang ikut mendukung dalam pencapaian SDGs yaitu LAZISMU. LAZISMU yang merupakan unsur dalam persyarikatan Muhammadiyah yang memiliki sebuah konsep gerakan Teologi Al-Maun atau bagaimana kita berbicara dalam menolong kaum *mustadh'afin* dengan cara melepaskan mereka dari jerat atau tali permasalahan sosial dengan meningkatkan kesadaran dan kesejahteraan kehidupan umat Islam itu

sendiri. LAZISMU yang kemudian bertanggungjawab dalam hal pengelolaan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf (ZISWAF), dengan beradanya LAZISMU dibawah naungan organisasi masyarakat Islam yaitu Muhammadiyah, tentunya memiliki banyak faktor yang dapat membantu dalam proses pelaksanaan program, seperti bekerjasama dengan Majelis Dikdasmen (Pendidikan Dasar dan Menengah) dalam persoalan pendidikan dan juga AUM (Amal Usaha Muhammadiyah) yang berada di berbagai aspek, terutama pendidikan baik dari tingkat pra sekolah sampai menengah atas, bahkan juga perguruan tinggi. Dengan adanya fasilitas tersebut, maka sejauh mana peran dan kontribusi LAZISMU dengan efektivitas program pilar pendidikan yang akan mendukung terwujudnya SDGs (*Sustainable Development Goals*), dan terkhususnya dalam bidang pendidikan (*Quality Education*) di Wilayah Yogyakarta.

B. Fokus Penelitian

Dalam penelitian kualitatif ini, fokus penelitian yaitu sejauh mana peran dan efektivitas lembaga filantropi LAZISMU di Wilayah Yogyakarta dengan program pendidikan dalam menciptakan pendidikan berkualitas di Wilayah Yogyakarta untuk mencapai tujuan SDGs (*Quality Education*).

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran lembaga filantropi LAZISMU di Wilayah Yogyakarta dalam mendukung bidang pendidikan?

2. Bagaimana efektivitas program Pendidikan LAZISMU di Wilayah Yogyakarta dalam mewujudkan pendidikan berkualitas untuk mencapai tujuan SDGs?
3. Apa saja yang menjadi faktor pendorong dan penghambat program Pendidikan LAZISMU dalam mewujudkan pendidikan berkualitas di Wilayah Yogyakarta?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran filantropi LAZISMU di Wilayah Yogyakarta dalam mendukung bidang pendidikan.
2. Untuk mengetahui Efektivitas program Pendidikan LAZISMU di Wilayah Yogyakarta dalam mewujudkan pendidikan berkualitas untuk mencapai tujuan SDGs.
3. Untuk mengetahui faktor pendorong dan penghambat program Pendidikan LAZISMU dalam mewujudkan kualitas Pendidikan di Wilayah Yogyakarta.

E. Manfaat Penelitian

Secara umum manfaat penulisan ini terbagi menjadi dua aspek, yaitu secara teoritis dan secara praktis

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan sumbangsih pemikiran dalam pengetahuan bagi ekonomi syariah mengenai peran lembaga filantropi Islam dalam program pendidikan,

serta menjadi rujukan terhadap penelitian selanjutnya tentang mewujudkan pendidikan berkualitas mencapai tujuan SDGs.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang lembaga filantropi Islam, khususnya LAZISMU dalam program pilar pendidikan di Wilayah Yogyakarta.
2. Bagi akademisi, semoga hasil penelitian ini dapat membantu dalam menambah wawasan dan referensi keilmuan mengenai filantropi Islam.
3. Bagi pemerintah, semoga dengan hasil penelitian ini dapat membantu memberikan informasi mengenai peranan lembaga filantropi islam dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan merata sehingga tercapai tujuan SDGs.